



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IQBAL
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA
3. NHK : 925857

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.485.600.000

1. Tanah Seluas 2485.86 m² di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m²/240 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 564.000.000
3. Tanah Seluas 2500 m² di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 600 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 318 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 381.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 464.000.000

1. MOTOR, HONDA BIET Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	104.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.053.600.000
III. HUTANG	Rp.	164.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.889.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpni.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpni.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.